

SIKAP POLITIK SANG KRESNA SEBAGAI TELADAN ETIS MENGHADAPI DINAMIKA PASCA PEMILU

Oleh

I Dewa Gede Darma Permana

Pimpinan Cabang Kesatuan Mahasiswa Hindu Indonesia Denpasar

dewadarma75@gmail.com

Abstract

The holding of general elections (Pemilu) reflects political stability in a democratic country. Elections are political contests that have the potential to pose challenges. In the history of the Mahābhārata epic, Kresna is described as being able to deal with the political turmoil that occurred in the country of Bharata. Through a cultural approach and Hindu philosophical studies, the character of Krishna can be correlated with the dynamics of elections. Based on this background, three issues are presented, namely the Division of Stories in the Mahabharata, Krishna's Political Attitude, and Krishna's Exemplary Behavior in facing the dynamics after the elections. The research method used was descriptive qualitative with a historical and philosophical hermeneutic approach. Data and information sources were taken from literature studies and analyzed using the Miles and Huberman type. This study was able to describe the results in a philosophical ethical manner, namely that Kresna's political attitude can be used as a role model so that the Indonesian people can be brave, independent, peaceful, and become smart voters in the post-election dynamics. The purpose of this study is to serve as an ethical and cultural guideline in maintaining a harmonious electoral dynamic situation.

Keywords: Political Stance, Sang Kresna, Post-Election Dynamics.

Abstrak

Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan cermin stabilitas politik di sebuah negara demokrasi. Pemilu merupakan kontestasi politik yang berpotensi memunculkan tantangan. Sang Kresna dalam sejarah Wiracarita Mahābhārata diceritakan mampu menghadapi gejolak kontestasi politik yang terjadi di negara Bharata. Melalui pendekatan budaya dan kajian filsafat Hindu, karakter Sang Kresna bisa dikorelasikan dengan dinamika kepemiluan. Berdasarkan latar belakang, tiga rumusan masalah dipaparkan, yaitu Pembagian Cerita dalam Mahabhārata, Sikap Politik Sang Kresna, dan Keteladanan Sang Kresna dalam menghadapi dinamika pasca Pemilu. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan historis dan hermeneutika filosofis. Sumber data dan informasi diambil dari studi pustaka dan dianalisis menggunakan tipe Miles dan Huberman. Penelitian ini mampu mendeskripsikan hasil secara etika filosofis bahwa, sikap politik Sang Kresna dapat dijadikan panutan agar masyarakat Indonesia mampu bersikap berani, independen, damai, dan menjadi pemilih yang cerdas dalam dinamika pasca Pemilu. Tujuan penelitian diarahkan sebagai pedoman teladan etis dan kultural dalam menjaga situasi dinamika kepemiluan yang harmonis.

Kata Kunci: Sikap Politik, Sang Kresna, Dinamika Pasca Pemilu.

I. PENDAHULUAN

Stabilitas politik adalah salah satu unsur yang harus dimiliki oleh setiap bangsa di dunia. Stabilitas politik mencerminkan kokohnya pemerintahan suatu negara dalam menghidupi masyarakat yang ada di dalamnya. Tanpa adanya stabilitas politik, keadaan suatu negara akan kacau balau. Hal ini bisa terlihat dari beberapa negara yang mengalami perang, dimana tiga variabel stabilitas politiknya tidak terpenuhi dengan baik, yaitu 1) pertumbuhan ekonomi, 2) kelembagaan negara yang baik, serta 3) partisipasi politik yang memadai (Syarofuzzaman & Al-hamid, 2024).

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah salah satu bangsa di dunia yang telah mentasbihkan diri sebagai negara demokrasi. Dimana selaras dengan konstitusi, terutama Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, kedaulatan serta kekuasaan bangsa yang paling tinggi berada di genggaman rakyat. Oleh karena itu, salah satu hajatan yang wajib dilaksanakan oleh Indonesia adalah terlaksananya Pemilihan Umum (Pemilu) secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (Luberjurdil). Pelaksanaan Pemilu menjadi salah satu prinsip dasar dari negara demokrasi yang menjamin kedaulatan rakyat Indonesia (Subiyanto, 2020).

Di era persaingan global saat ini, Pemilu di negara Indonesia tidak hanya menjadi ajang dalam menjalankan roda demokrasi sebagaimana mestinya. Namun di satu sisi, Pemilu juga jadi ajang pertarungan politik antar politisi dalam merebut tahta kekuasaan. Tidak jarang, segala usaha, ide, taktik, bahkan kecurangan dilakukan oleh beberapa oknum demi memuluskan langkah mencapai kursi pemerintahan. Dari tantangan tersebut, pada akhirnya bermuara sebagai sebab munculnya beberapa problematika

yang mengiringi Pemilu sebagai pesta demokrasi (Putri, 2023).

Sebagai contoh, penelitian dari Yehezkiel dan Takalamingan (2023) pernah menelaah salah satu problematika pelik Pemilu, yaitu Politik Identitas. Dengan mengambil keuntungan dari suku, agama, ras, dan golongan tertentu, beberapa oknum politisi atau pendukung bayangan (*Buzzer*) memanfaatkan hal tersebut untuk menjatuhkan pihak lawan. Selain itu, politik identitas juga bisa dijadikan sarana untuk mengadu domba pihak yang sedang berkontestasi secara tidak sehat. Strategi dan sikap ini tidak pelak sering memunculkan ketegangan, bahkan konflik dalam pelaksanaan Pemilu. Jika sikap ini dibiarkan dan dijadikan pedoman untuk memperoleh kemenangan dalam Pemilu, sudah barang tentu akan memunculkan potensi bahaya dalam memecah persatuan dan kesatuan Bangsa Indonesia. Meskipun telah mampu menjabarkan secara holistik tentang politik identitas, penelitian tersebut belum menyentuh landasan etis yang bisa dihadirkan sebagai jawaban permasalahan.

Lebih lanjut dalam penelitian yang dilakukan oleh Delmana dan tim (2020), dikemukakan juga salah satu problematika dinamika Pemilu negara Indonesia, yaitu Politik Uang. Bahkan dari sisi historis, data kepemiluan pernah mencatat angka 19,4% - 33,1% pemilih di Indonesia terlibat dalam transaksi politik uang. Sehingga tidak bisa dipungkiri, apabila negara Indonesia yang mengagungkan stigma ‘demokrasi; justru berada di ranking 3 besar sebagai negara dengan praktik *Money Politics* terbesar. Padahal dari sisi potensi, politik uang membawa iklim Pemilu dan demokrasi yang membahayakan bagi suatu negara, karena memunculkan calon pemimpin yang tidak memiliki integritas dalam memimpin suatu pemerintahan.

Ditambahkan oleh penelitian Abdurrohman (2021), masifnya problematika Pemilu berupa politik uang juga memicu lahirnya para koruptor dan konflik lain pasca Pemilu dilaksanakan. Dengan demikian, dua penelitian tersebut juga telah bisa menganalisis secara komprehensif tentang politik uang, namun pembahasan belum menggali refleksi pembelajaran sebagai wujud tanggung jawab moral secara aksiologi.

Dalam menghadapi tantangan dan problematika di pelaksanaan dan pasca Pemilu, tidaklah hanya menjadi tugas dari lembaga – lembaga kepemiluan saja. Problematis pasca kepemiluan adalah tantangan dan tanggung jawab moral bersama, terutama masyarakat Indonesia yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih. Terlebih sebagai negara yang mengakui adanya agama dan kebudayaan yang kental, refleksi ajaran dan cerita sejarah yang diberikan oleh tokoh di masa lalu, bisa dijadikan pedoman untuk menamengi diri guna menjadi masyarakat yang cerdas dan bermartabat.

Salah satu wiracarita besar dunia yang cukup terkenal di Nusantara dengan basis nilai *Dharma* atau kebenaran yang kuat adalah Mahābhārata. Salah satu bagian kisah yang paling terkenal, adalah disaat mulainya perang besar kontestasi politik di dalam keluarga Bharata, antara Panca Pandava dan Kaurava. Bagian ini pula, yang memunculkan salah satu tokoh yang sangat ahli dalam memainkan sikap politiknya bernama Sang Kresna. Beberapa kali dalam kisah Mahābhārata, Sang Kresna diperlihatkan mampu memainkan intrik dan sikap politiknya berbasis ajaran *Dharma* yang cenderung mendamaikan, independen, namun di waktu tertentu bisa tegas dalam menghukum tokoh yang melanggar kebenaran (Titib, 2008).

Apabila dikorelasikan dengan tantangan dan problematika kepemiluan, analisis sikap dan strategi politik Sang Kresna bisa dijadikan jawaban konkret untuk negara Indonesia yang telah selesai melaksanakan Pemilu. Masyarakat yang hadir sebagai pemilih, tokoh politik, bahkan setiap unsur perpolitikan bisa menjadikan kiat yang dilakukan oleh Sang Kresna sebagai suri teladan yang mendamaikan. Dengan demikian, telaah sikap Sang Kresna pada situasi Pemilu bisa menjadi hal yang esensial dan urgensi guna menghadapi tantangan kepemiluan yang cukup pelik. Hasil analisis juga menjadi jawaban atau *counter* dari hasil penelitian tokoh Wiracarita Mahābhārata lainnya (Permana, 2023), yakni tentang analisis karakter Śakuni yang menjadi tantangan berat di situasi kontestasi politik.

Berdasarkan analisis latar belakang dan dikuatkan dengan usaha menjawab gap penelitian relevan terdahulu, tercetuslah hasil penelitian yang berjudul “Sikap Politik Sang Kresna sebagai Teladan Etis Menghadapi Dinamika Pasca Pemilu.” Dimulai dari penjabaran tentang hakikat pembagian kisah Mahābhārata serta kiat tokoh Sang Kresna dalam wiracarita, penelitian lebih lanjut diarahkan untuk menelaah sikap politik Sang Kresna dalam kisah Mahābhārata sebagai suri teladan etis guna menghadapi dinamika pasca Pemilu. Penelitian ini dihadirkan dengan tujuan utama sebagai pedoman rakyat Indonesia untuk menjadi pemilih yang bermartabat, peduli dengan stabilitas politik negara, serta tetap mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa di atas kepentingan perseorangan pasca proses dinamika kepemiluan.

Analisis sikap politik Sang Kresna dalam penelitian ini

menggunakan metode kualitatif deskriptif, dimana selaras dengan yang dikemukakan oleh Sugiyono (2023), pembahasan tentang hakikat wiracarita Mahābhārata didasarkan pada filsafat postpositivisme. Dimana proses penjabaran, dipaparkan secara alami dan mengutamakan interpretasi daripada generalisasi. Pendekatan penelitian ini memakai pendekatan historis serta hermeneutik filosofis (Bakker dan Zubair, 1990). Melalui pendekatan tersebut, penelitian ini berusaha menggali sejarah wiracarita Mahābhārata serta memberikan pemaknaan terhadap sikap politik Sang Kresna dari proses interpretasi secara sistematis. Dari proses interpretasi, lahirlah hasil telaah yang kritis tentang sikap politik Sang Kresna, sebagai suri teladan dalam menghadapi tantangan situasi pasca Pemilu.

Dari sisi objek material, penelitian ini berdasar pada situasi Pemilihan Umum (Pemilu) dengan segala dinamikanya. Di satu sisi, objek formal berdasar pada sikap politik Sang Kresna dalam wiracarita Mahābhārata yang memiliki korelasi dengan situasi dinamika kepemiluan. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari studi literatur, terutama dari artikel ilmiah yang terakreditasi dan buku yang selaras dengan topik bahasan. Dari sumber literatur tersebut, data yang telah dikumpulkan kemudian ditelaah menggunakan teknik analisis interaktif Miles dan Huberman. Dimana tahapannya meliputi 3 langkah, yaitu: 1) Mereduksi data yang membahas tentang sepak terjang tokoh Sang Kresna dan situasi Pemilu, 2) Menyajikan data dalam bentuk butir pembahasan yang komprehensif, serta 3) Memberikan konklusi sebagai temuan baru atau ujung hasil penelitian.

II. PEMBAHASAN

2.1 Hakikat Pembagian Kisah Wiracarita Mahābhārata

Dari sisi pembagian cerita, kisah Mahābhārata hadir melalui 18

bagiannya yang disebut *Asta Dasa Parva* dan terdiri atas syair sebanyak 100.000 sloka (Titib, 2008). Nama Parva dan esensi cerita dari 18 bagian atau *Parva* tersebut (Sudirga & Segara, 2017), antara lain:

1. *Ādiparva* (ādi = pertama) menjadi bagian pertama yang mengisahkan kisah dua raja bersaudara Dhrtarāsthra dan Pāndu selaku keturunan dari dinasti Bulan/Candra. Dhrtarāsthra menjadi raja yang memiliki cacat tubuh yaitu kebutaan, menikah dengan Gāndhārī, melahirkan 100 putra yang bernama Kaurava. Sementara Pāndu adiknya menikah dengan Kuntī dan Mādrī, yang melahirkan 5 orang putra yang bernama Pandava. Bagian ini memiliki esensi cerita berupa masa *Brahmacari* atau masa belajar kedua belah pihak di asrama Guru Drona dan awal pertentangan kedua belah pihak akibat hasutan Śakuni kepada Duryodhana, kakak tertua Kaurava.
2. *Sabhāparva* (sabhā = sidang, pertemuan) menjadi bagian kedua yang mengisahkan kehidupan pihak Pāndava dan Kaurava di Hastināpura pasca menempuh pendidikan. Bagian ini memiliki esensi cerita ketika Yudhiṣṭhira selaku kakak tertua Pandava yang dijebak dalam permainan dadu oleh Duryodhana atas saran Śakuni. Hasil dari permainan dadu tersebut, kekuasaan Pandava di kerajaan Indraprastha direnggut, bahkan Drupadi hampir dilecehkan oleh pihak Kaurava. Di bagian ini pula, diperlihatkan kesaktian Sang Kresna yang menjadi juru penyelaman, sehingga Drupadi gagal dipermalukan. Namun tetap, keputusan permainan menyatakan pihak Pandava dan istrinya Drupadi mesti diasingkan selama 12 tahun di dalam hutan, serta tambahan menjalani 1 tahun penyamaran.

3. *Vānaparva* menjadi bagian ketiga yang melukiskan kisah pengasingan pihak Pāndava dan istrinya di dalam hutan Kamyaka.
4. *Virātparva* menjadi bagian keempat yang melukiskan kisah penyamaran pihak Pāndava di kerajaan Virāta.
5. *Udyogaparva* menjadi bagian kelima yang melukiskan usaha kompromi yang dilakukan oleh pihak Pāndava kepada pihak Kaurava untuk meminta hak mereka kembali. Mediasi pihak Pandava dipimpin oleh Sang Kresna. Namun mediasi gagal karena hasutan Śakuni dan tercetuslah perang Bhārata. Di bagian ini diceritakan juga bagaimana sikap politik Sang Kresna yang menjadi juru damai dengan tetap berpegang teguh kepada ajaran kebenaran.
6. *Bhīsmaparva* menjadi bagian keenam yang melukiskan perang Bhārata dan kejatuhan Bhīṣma sebagai panglima perang pihak Kaurava. Bagian ini juga memiliki esensi nasihat Sang Kresna kepada Arjuna tentang ajaran kehidupan yang akhirnya melahirkan kitab *Bhagavad Gita*.
7. *Dronaparva* menjadi bagian ketujuh yang melukiskan perang Bhārata dan gugurnya Droṇa sebagai panglima perang pihak Kaurava. Bagian ini juga mengisahkan gugurnya ksatria hebat lainnya di kedua belah pihak, yaitu Abimanyu anak Arjuna, Jayadrata di pihak Kaurava, dan Gāthotkaca anak dari Bhīma. Di bagian ini, diperlihatkan siasat politik Sang Kresna yang memanggil Gāthotkaca dan menutupi matahari dengan Cakra Sudarsana guna mengelabui ide licik Śakuni.
8. *Kamaparva* menjadi bagian kedelapan yang melukiskan perang Bhārata dan kematian Karna sebagai panglima perang pihak Kaurava.
9. *Śalyaparva* menjadi bagian kesembilan yang melukiskan perang Bhārata dan kematian Śalya sebagai panglima perang pihak Kaurava. Pada bagian ini juga mengisahkan gugurnya Śakuni di tangan Nakula dan Sadeva, serta kekalahan Duryodhana di tangan Bhīma.
10. *Sauptikaparva* menjadi bagian kesepuluh yang melukiskan perang malam oleh Aśvatthama dan kematian anak-anak Dewi Drupadi. Pada bagian ini juga melukiskan kematian Duryodhana, dan kutukan Sang Kresna kepada Asvatthama.
11. *Striparva* menjadi bagian kesebelas yang melukiskan ratap tangis janda dan upacara kematian bagi para korban perang.
12. *Sāntiparva* menjadi bagian kedua belas yang melukiskan kematian Bhīṣma yang sebelumnya masih terbaring di atas anak panah. Sebelum meninggalkan dunia, beliau memberikan wejangan Dharma kepada Yudhiṣṭira.
13. *Anusāsanaparva* menjadi bagian ketiga belas yang melukiskan awal kekuasaan Pāndava di kerajaan Hastinapura.
14. *Aśvamedhikaparva* menjadi bagian keempat belas yang melukiskan Upacara Yajña Aśvamedha oleh Pāndava untuk menobatkan Yudhiṣṭhira sebagai raja di raja.
15. *Aśramavāsikaparva* menjadi bagian kelima belas yang melukiskan perjalanan tiga Dhṛtarāstra, Widura, Kuntī, dan Gandhari di dalam hutan yang pada akhirnya menghanguskan mereka di dalamnya.
16. *Mausalaparva* menjadi bagian keenam belas yang melukiskan kehancuran keturunan Yadu di

- Dwaraka akibat senjata sakti berupa Gada.
17. *Mahāprasthānikaparva* menjadi bagian ketujuh belas yang melukiskan perjalanan Pāndava ke Gunung Himawan, dan penyerahan tahta kerajaan kepada Pariksit cucu Arjuna.
 18. *Svargārohanaparva* menjadi bagian kedelapan belas yang melukiskan kematian Drupadi dan satu-satu saudara Pandava selama perjalanan mendaki Gunung Himawan. Satu-satunya yang masih bertahan adalah Yudhiṣṭhira dengan ditemani seekor anjing hitam yang sesungguhnya perwujudan Sang Hyang Dharma. Bagian ini diakhiri dengan ujian terakhir Yudhiṣṭhira sebelum menuju alam Svarga.

Melalui penjelasan tersebut, semakin mempertegas bahwa wiracarita Mahābhārata mempunyai struktur cerita yang runtut dan bagiannya mengandung ajaran moral yang abadi (Damayanti, 2018). Ajaran moral tersebut, lahir sebagai pedoman luhur untuk manusia dalam menjalani kehidupan. Disamping itu, wiracarita Mahābhārata juga menawarkan filosofis hidup, pengorbanan, kontestasi politik, sampai ajaran rahasia untuk memperoleh kebebasan atau Moksa (Titib, 2008). Oleh karena itu, tidak salah apabila wiracarita Mahābhārata tidak henti-hentinya menjadi bahan interpretasi bahkan analisis penelitian untuk memperoleh kandungan pengetahuan baru untuk menjadi manusia yang seutuhnya.

2.2 Kiat Sikap Politik Sang Kresna dalam Wiracarita Mahābhārata

Jika mengacu kepada cerita agung Mahābhārata, Sang Kresna adalah putra raja Basudewa dari kerajaan Madhura, dan setelah menumbangkan kekuasaan Pamannya yang kejam bernama Kanva, beliau mendirikan dan menjadi raja di sebuah kerajaan besar

dan megah bernama Dwaraka. Dari beberapa part kisah, Sang Kresna diperlihatkan sebagai tokoh agung, bijaksana, serta dijadikan panutan atau tuntunan oleh tokoh lainnya. Bahkan Śakuni yang dikenal akan kelicikannya, juga menaruh rasa kewaspadaan tinggi dan akhirnya tidak berdaya di hadapan kiat sikap politik dari Sang Kresna. Jika ditarik dari beberapa penggalan cerita Mahābhārata (Titib, 2008), berikut adalah sepak terjang kiat dari sikap politik Sang Kresna yang bisa dijadikan pedoman untuk menjawab tantangan dan problematika Pemilu, antara lain:

1. Tokoh Penghukum Sang Penyebar Berita Bohong ‘Sisupala’

Pada bagian *Sabhāparva*, terdapat salah satu tokoh antagonis bernama Sisupala. Ia adalah ksatria sekaligus raja yang dikenal mempunyai sikap iri hati cukup tinggi. Sisupala dikenal sebagai sosok yang tidak suka akan keberhasilan raja-raja pesaingnya. Termasuk dalam hal ini kepada pihak Pandava dan Sang Kresna. Terlebih lagi, Sisupala tumbuh dan besar atas bimbingan seorang raja durjana dari negeri Magadha bernama Jarasanda. Sehingga, disaat mendengar informasi bahwa Jarasanda kalah dalam pertarungan melawan Bhīma karena bantuan Sang Kresna, rasa iri hati serta kebencian Sisupala kepada pihak Pandava dan Sang Kresna tidak terbantahkan.

Tibalah saat prosesi Rajasuya Yadnya untuk Sang Yudhiṣṭhira di kerajaan Indraprastha. Atas dasar niat yang tulus untuk mengirim pesan persahabatan dan mempersatukan negeri Bharata, pihak Pandava mengundang semua ksatria dan pimpinan raja termasuk Sisupala dan pihak Kaurava. Namun bukannya datang dengan itikad baik, Sisupala di acara penobatan justru mulai menyebar berita bohong, fitnah, dan cercaan kepada Sang Kresna beserta pihak Pandava. Tindakan tersebut juga didukung oleh siasat licik Śakuni

untuk menjatuhkan pihak Pandava dan Sang Kresna.

Apabila dikontekstualisasikan dengan nilai Hindu berbasis kerangka filosofis, hal yang dilakukan oleh Sisupala sesungguhnya bertentangan dengan ajaran *Wacika Parisudha*. Dimana setiap manusia terlebih seorang pemimpin yang berbudi pekerti luhur, harus berusaha menjaga ucapan, kata – kata, dan kalimat yang keluar dari mulutnya. Menimbang secara implikasi, setiap insan bisa menerima konsekuensi baik atau buruk dari ucapan yang digunakannya. Hal ini selaras dengan pesan dari Kakawin Niti Sastra V.3 (Negara dan Putra, 2020; Pratiwi, 2022) yang berbunyi sebagai berikut.

*Wasita nimittanta manemu
laksmi*
*Wasita nimittanta pati
kapangguh*
*Wasita nimittanta manemu
duhka*
*Wasita nimittanta manemu
mitra*

Terjemahan:

“Dari ucapan seseorang bisa memperoleh kebahagiaan;
Dari ucapan seseorang bisa memperoleh kematian;
Dari ucapan seseorang bisa memperoleh kesedihan;
Dari ucapan seseorang bisa memperoleh teman.

Berdasarkan pesan dalam pustaka suci tersebut, sangat relevan dengan apa yang terjadi pada Sisupala dan apa yang dilakukan oleh Sang Kresna di kejadian berikutnya. Dalam hal ini, Sang Kresna sebagai cermin dari pesan itu sendiri sesuai janjinya kepada ibu Sisupala hanya akan mengampuni 100 kesalahan yang diperbuat oleh anaknya. Namun lebih daripada itu, Sang Kresna tidak akan segan menghukum Sisupala sesuai kejahatan yang ia

perbuat, baik lewat pikiran, perbuatan, dan tutur katanya. Tibalah saat perbuatan Sisupala sudah melampaui batas keseratus kali dengan menghina upacara suci, tokoh agung, serta menebar berita bohong yang menyesatkan. Sang Kresna di titik puncak sebagai seorang ksatria, penasihat, sekaligus raja yang diberikan mandat oleh Ibu Sisupala untuk menghukum, akhirnya memenggal kepala Sisupala dengan Cakra Sudarsana atas izin raja – raja yang hadir di upacara tersebut. Hukuman ini selaras dengan banyaknya kejahatan yang telah Sisupala perbuat untuk negeri, terutama melalui ucapannya.

2. Pihak Independen dengan Tetap Memihak pada Kebenaran

Dari sisi silsilah, Sang Kresna sesungguhnya merupakan saudara sepupu, baik dari pihak Pandava maupun pihak Kaurava. Mengetahui sepupunya selalu berada di dinamika panas akan kontestasi politik memperebutkan tahta Hastinapura, Sang Kresna tetap berkomitmen mengambil sikap politik terbuka dan tetap independen. Beliau di beberapa dinamika awal kisah, diperlihatkan menjadi pihak yang toleran dengan tidak terlalu condong terikat pada salah satu pihak.

Apabila dikontekstualisasikan dengan nilai Hindu berbasis kerangka filosofis, hal yang dilakukan oleh Sang Kresna tersebut sesungguhnya selaras dengan ajaran *Catur Paramita* sebagai empat pedoman sikap berbudi pekerti luhur dalam kehidupan. Dimana di salah satu bagianya, terdapat *Upeksa* yang memberikan arahan insan manusia untuk dapat menjadi pribadi yang seimbang, toleran, dan terbebas dari beban serta ikatan emosional yang berlebihan (Rudiarta, 2025). Hal ini diperkuat dengan pesan Sang Kresna kepada Arjuna dalam Bhagavadgītā IX-29 (Tim Pengkaji dan Penerjemah, 2021a) yang berbunyi sebagai berikut.

*samo 'ham sarvabhūteṣu na
me dveṣyo 'sti na priyāḥ,
ye bhajanti tu mām bhaktyā
mayi te teṣu cāpyaham IX-29*

Terjemahan:

“Aku adalah sama pada semua makhluk, tidak ada yang terbenci atau tercinta padaku. Akan tetapi mereka yang menyembahku dengan bakti, mereka ada di dalamku dan aku pun ada di dalam mereka.”

Di satu sisi, menimbulang adanya Paman Śakuni yang senantiasa hobi menyulut api perselisihan, dan menjadi dalang dibalik konflik antara kedua belah pihak, tidak ayal juga mewajibkan Sang Kresna untuk turun tangan membantu Pandava yang menjadi pihak termarjinalkan di Hastinapura. Hal ini selaras dengan prinsip Sang Kresna untuk menegakkan kebenaran, dan memberikan pelajaran bagi pihak yang menyebar kejahatan. Meskipun demikian, beliau tetap memperlihatkan sisi independen dan keadilan kepada dua belah pihak yang tengah berkontestasi. Termasuk dalam hal ini kepada sepupu-sepunya, yaitu pihak Pandava dan Kaurava.

Keadilan dan sisi independen Sang Kresna bisa terlihat saat bagian *Udyogaparva*, dimana Beliau membebaskan baik pihak Pandava dan Kaurava untuk memilih pasukan atau dirinya sendiri sebagai kusir kereta untuk terlibat di dalam perang Bharata. Pada akhirnya, Kaurava yang diwakili Duryodhana memilih pasukan, serta Pandava yang diwakili Arjuna memilih Sang Kresna sebagai kusir keretanya. Sikap politik Sang Kresna yang independen dan terbuka ini, justru cenderung beberapa kali membuat Śakuni mengelus dada karena gagal melaksanakan aksi liciknya untuk menyingkirkan Para Pandava.

3. Juru Damai di Tengah Perseteruan

Disaat mengetahui berita bahwa kontestasi politik kedua belah sepupunya memuncak pada Perang Bharata, mau tidak mau membuat Sang Kresna sebagai bagian dari saudara juga mesti mengambil sebuah sikap politik. Namun sebelum perang dimulai, Sang Kresna dengan karakternya sebagai juru damai dan penengah, akhirnya memutuskan menemui kedua belah pihak dengan hati yang tenang, baik Pandava dan Kaurava. Maksud sikap Sang Kresna tersebut adalah mencegah terjadinya perang di antara kedua belah sepupunya.

Apabila dikontekstualisasikan dengan nilai Hindu berbasis kerangka filosofis, sikap sabar, tenang, dan mengusahakan kedamaian yang ditunjukkan oleh Sang Kresna dengan menemui kedua belah pihak tersebut sesungguhnya selaras dengan ajaran *Dasa Yama Brata* sebagai sepuluh macam pengendalian diri pada tataran jasmani. Dimana di salah satu bagianya, terdapat *Dama* yang memberikan arahan insan manusia untuk dapat menjadi pribadi yang sabar, tenang, dan dapat menasehati diri sendiri, sehingga mampu menciptakan keadaan damai untuk diri sendiri serta orang lain di lingkungan sekitar (Atmianti, 2024). Hal ini merefleksikan dengan tepat pesan Saramuccaya 115 (Tim Pengkaji dan Penerjemah, 2021b) yang berbunyi sebagai berikut.

*dharmaṁrthaḥetoh
kṣamatāstitikṣoḥ
śāntiruttamā,
lokasaṁgrahaṇārthāṁ vai
sā tu dhairyena labhyate.*

Terjemahan:

“Demi insan yang berkenan tetap tenang, sabar dengan ucapan, pemberi maaf serta berkenan menahan diri untuk kebenaran (*dharma*) dan kesejahteraan (*artha*), akan tercipta kedamaian yang dipupuk lewat kesabaran.”

Berkat sikap *Dama* yang diimplementasikan, Sang Kresna pada akhirnya menyadari pihak mana yang sesungguhnya menginginkan perang, dan pihak mana yang menginginkan jalan damai atau persuasif. Di satu sisi, pihak Pandawa yang dipimpin oleh Yudhiṣṭhīra pada hakikatnya menginginkan jalan damai dan tidak ingin berperang. Dengan catatan sesuai kesepakatan awal pasca permainan dadu, hak – hak mereka baik berupa kerajaan Indraprastha dan tempat tinggal semestinya dikembalikan oleh pihak Kaurava.

Di sisi lain, sikap berbeda dipilih oleh pihak Kaurava. Pihak Kaurava atas hasutan Śakuni bersikukuh tidak ingin mengembalikan kekuasaan dan istana yang telah mereka peroleh saat permainan dadu. Bahkan, saat Sang Kresna mencoba menemui pihak Kurawa dan menjabarkan maksud dari pihak Pandava untuk mengambil jalan damai, Pihak Kaurava dengan tegas menolak dan bahkan mencoba memermalukan Sang Kresna. Namun berkat kesaktiannya, pihak Kauravalah yang justru dipermalukan di hadapan sidang Istana Hastinapura.

4. Counter dan Jawaban dari Karakter Licik Śakuni

Jika ditelaah puncak dari kelicikan yang diperbuat oleh Śakuni, akan merujuk pada puncak dari kontestasi politik antara Pandava dan Kaurava, yaitu Perang Bharata. Perseteruan tersebut, menjadi simbolisasi dari puncak ambisi dan kehausan Sangkuni akan kekuasaan untuk ponakannya. Terlebih di saat masa – masa sebelum perang, Śakuni juga berhasil menebar daya liciknya dengan kata – kata manis dan gratifikasi untuk menjerat tokoh – tokoh agung yang pada awalnya mengedepankan asas kebenaran seperti kakek Bhīma, guru Drona, dan pamannya Nakula dan Sadewa, yaitu

Śalya untuk berpihak pada Kaurava di dalam peperangan.

Lebih lanjut di saat peperangan telah tiba, daya licik dari Śakuni juga masih belum terbendung. Daya licik ini mengerucut pada tindakan curang yang melanggar asas peperangan. Seperti penyerangan tiba – tiba di malam hari yang akhirnya membuat Raja Virata gugur, mencoba menjatuhkan Arjuna dengan menyembunyikan Jayadrata agar tidak turut serta dalam peperangan, serta tindakan licik lainnya. Semua tindakan licik tersebut sesungguhnya sangat mengganggu dan menyulitkan pihak pihak Pandava dalam peperangan.

Sebagai seorang kusir dan diminta oleh Arjuna sebagai seorang penasihat, sudah barang tentu Sang Kresna tidak tinggal diam. Beberapa kali, Sang Kresna menyadari daya licik Śakuni dan memberikan jawaban untuk menghadapinya. Sebagai contoh, guna menghadapi penyerangan tiba – tiba di malam hari oleh pihak Kaurava, disiasati oleh Sang Kresna dengan meminta Bhīma untuk memanggil anaknya, yaitu Gāthotkaca yang ahli berperang di malam hari. Kemudian, usaha Śakuni untuk menyembunyikan Jayadrata saat perang juga patah dengan siasat Sang Kresna yang menutupi matahari, sehingga membuat Jayadrata keluar dari persembunyiannya. Dengan demikian dapat dikatakan, di atas langit masih ada langit. Sepintar – pintarnya Śakuni dalam merancang rencana licik, ternyata ada yang pihak lebih cerdas untuk memberikan serangan baliknya untuk menegakkan kebenaran.

Apabila dikontekstualisasikan dengan nilai Hindu berbasis kerangka filosofis, kekalahan dan gagalnya rencana licik Sangkuni oleh Sang Kresna tersebut sesungguhnya adalah refleksi dari hakikat *Dharma* atau kebenaran itu sendiri. Dimana apapun keadaan dan bagaimanapun seseorang berusaha berbuat jahat, kebenaran akan selalu jadi penghalang dan senantiasa punya jalan

untuk tetap tegak. Hal ini juga diperkuat dengan pesan Sang Kresna kepada Arjuna dalam Bhagavadgītā IV-7 dan IV-8 secara berturut-turut (Tim Pengkaji dan Penerjemah, 2021a) yang berbunyi sebagai berikut.

*yadā yadā hi dharmasya
glānirbhavati bhārata,
abhyutthānamadharma
tadātmānam sriyāmyaham
IV-7.*

Terjemahan:

“Wahai Putra Bhārata!
Disaat *dharma* mengalami kemerosotan dan *adharma* justru semakin merajalela, pada waktu tersebut Aku sendiri yang akan turun menjelaskan diri.”

*paritrāṇāya sādhūnām
vināśāya ca duṣkṛtām,
dharmasāṁsthāpanārthāya
sambhavāmi yuge yuge. IV-
8.*

Terjemahan:

“Dalam usaha melindungi orang – orang yang berlandaskan kebaikan, menghancurkan angkara murka, dan menegakkan kembali tatanan kebenaran Aku menjelaskan diri pada setiap zaman.”

2.3 Suri Teladan Sikap Politik Sang Kresna dalam Dinamika Pasca Pemilu

Melalui penjabaran tentang kiat dan sepak terjang sikap politik Sang Kresna dalam wiracarita Mahābhārata, dapat diklarifikasi secara pasti bahwa tokoh Sang Kresna menjadi satu dari sekian karakter protagonist. Dikorelasikan dari kisah awal Ādi-parva, sikap dan kiat Sang Kresna dalam kontestasi politik Bangsa Kuru telah menampilkan karakter bijaksana, cerdik, independen, serta senantiasa berusaha

menjadi juru damai dan penolong pihak yang ada sisi kebenaran (Titib, 2008). Bahkan dari sisi pergulatan cerita tentang kontestasi antara pihak Pandava dan Kaurava, Sang Kresna secara terbuka menjadi sosok yang ditakuti oleh para tokoh antagonis, termasuk Śakuni. Seberapa besar dan matang rencana licik yang dipersiapkan untuk menebar berita bohong, hasutan, dan menjatuhkan pihak Pandava, Sang Kresna seakan menjadi juru *counter* dari segala kelicikan Śakuni tersebut.

Apabila dikorelasikan dengan dinamika kontestasi politik yang sering hadir pada Pemilihan Umum (Pemilu), kiat dari sikap politik Sang Kresna dalam wiracarita Mahābhārata bisa menjadi jawaban atas segala tantangan dan problematika yang dihadirkan pada saat atau pasca Pemilu. Terlebih lagi, tantangan dan problematika kepemiluan hari ini, seperti berita bohong, politik identitas, dan adu domba masih menyertai serta memiliki kemiripan dengan usaha – usaha licik yang dilakukan oleh Śakuni dalam wiracarita Mahābhārata. Dengan demikian, sikap politik yang telah ditunjukkan oleh Sang Kresna sebagai *counter* dari karakter licik Śakuni dalam kontestasi politik, bisa ditelaah untuk ditemukan sari – sari teladannya dalam menghadapi dinamika Pemilu. Berikut secara interpretative, akan dipaparkan hasil telaah kiat sikap politik Sang kresna yang bisa dijadikan suri teladan dalam menghadapi dinamika Pemilu.

1. Bersikap Berani dan Tegas pada Kecurangan Pemilu

Pada kisah *Sabhāparva* diceritakan umpanan, hasutan, dan berita bohong yang disebar oleh Sisupala saat *Rajasuya Yadnya*. Bahkan sebelum itu, Sisupala sudah melakukan beberapa kali tindak kejahatan dan upaya – upaya yang merusak ketentraman di negeri Bharata kepada raja – raja lainnya (Titib, 2008). Terlebih ketika telah diberikan batas toleransi sampai 100 kali oleh Ibundanya sendiri, Sisupala masih belum

belajar dan akhirnya melampaui batas dari kejahatan yang bisa diperbuatnya. Pada akhirnya, Sang Kresna sebagai juru adil, dengan sikap berani dan tegasnya menghukum Sisupala selaras dengan segala kejahatan yang telah ia perbuat.

Apabila dikorelasikan dengan ajaran luhur Susila dalam agama Hindu, perbuatan jahat yang telah dilakukan oleh Sisupala sangat bertentangan dengan ajaran *Tri Kaya Parisudha*, terutama di bagian *Wacika Parisudha* atau berkata yang mulia. Dimana, Sisupala seperti pada kisah telah mengeluarkan perkataan yang jahat kepada tokoh agung (*Ujar Ahala*), perkataan yang menghardik pelaksana *Yadnya* (*ujar apgras*), perkataan yang memfitnah Sang Kresna (*ujar pisuna*), serta menyebar berita atau hasutan bohong di sidang istana (*ujar mithya*) (Arini & Pramana, 2021). Dengan demikian, sikap tercela Sisupala yang suka meracuni dengan kata – kata menjadi perbuatan yang perlu diwaspadai dan dikendalikan. Terlebih saat berlangsungnya dan pasca kontestasi politik, Karakter Sisupala bisa dikaitkan dengan oknum yang sama – sama senang memakai cara kotor berupa berita bohong, adu domba, dan fitnah untuk menghancurkan lawan politiknya. Hal inilah sekali lagi yang perlu dihindari, menimbang selain melukai hati orang lain, berbuat dan berkata yang jahat memiliki potensi besar untuk merugikan diri sendiri, seperti yang dilakukan oleh karakter seperti Sisupala.

Di satu sisi, perbuatan berani dan tegas ditunjukkan oleh Sang Kresna apabila dikorelasikan dengan agama Hindu sesungguhnya selaras dengan salah satu bagian dari ajaran kepemimpinan luhur, yaitu *Asta Brata*. Dimana sebagai seseorang yang memiliki jiwa kepemimpinan, Sang Kresna telah memedomani sikap *Baruna Brata*, yang tidak segan menghukum dan membersihkan segala bentuk ancaman masyarakat seperti Sisupala (Nadra,

2022). Dengan demikian, sikap berani dan tegas yang ditunjukkan oleh Sang Kresna bisa dijadikan suri teladan saat berlangsungnya dan pasca Pemilu untuk menghadapi berita bohong, adu domba, bahkan politik identitas yang masih mencuat. Menimbang sebagai pemilih, masyarakat juga memiliki hak untuk melaporkan segala dugaan tindak kecurangan dan problematika kepemiluan pada lembaga yang berwenang, yaitu Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang telah siap sedia menjaga kondusifitas pelaksanaan Pemilu (Rambe, 2022). Oleh karena itu, telaah sikap politik secara interpretatif ini bisa menjadi pedoman masyarakat Indonesia agar memiliki sikap berani, tegas, dan tidak mudah diracuni oleh kata yang menyesatkan.

2. Bersikap Independen dan Adil di Tengah Kontestasi Politik

Meski terlihat lebih dekat dengan Pandava, pada hakikatnya Sang Kresna adalah pihak independen di tengah kontestasi politik Bangsa Kuru. Keterlibatan Sang Kresna hadir adalah ketika ada pihak yang mengalami bantuan dan pertolongan dari sisi kebenaran. Sisi independen Sang Kresna bisa terlihat saat permainan dadu di bagian *Sabhāparva*. Dengan kesaktiannya, Sang Kresna bisa saja membantu Pandava dalam permainan dadu dan mengalahkan pihak Kaurava, namun menimbang jalan yang diambil oleh Yudhiṣṭhira juga salah karena terlibat dalam permainan judi, Sang Kresna memilih tetap membiarkannya. Dikisahkan Sang Kresna hanya ikut campur ketika Drupadi hendak dilucuti pakaianya oleh pihak Kaurava (Titib, 2008).

Lebih lanjut, bukti Sang Kresna adalah pihak yang independen juga terlihat saat *Udyogaparva*. Dimana dikisahkan Sang Kresna memperlihatkan sisi keadilannya dengan sama – sama membiarkan pihak Pandava yang

diwakili oleh Arjuna dan pihak Kaurava yang diwakili oleh Duryodhana bebas memilih bantuan yang mereka inginkan. Pada akhirnya Arjuna memilih Sang Kresna sebagai kusir kereta dan penasihat dalam perang, sementara Duryodhana memilih pasukan perang yang dimiliki oleh Sang Kresna (Titib, 2008). Sikap independen ini tentu bisa dijadikan pedoman juga oleh masyarakat Indonesia, agar tidak menutup diri akan kontestasi dan tidak juga terlalu berlebihan dalam mendukung salah satu tokoh politik yang dapat menimbulkan kegaduhan. Sikap condong dalam memilih bisa disalurkan saat hari pemilihan tiba, dengan tetap mengutamakan rasa persatuan dan kondisi yang harmonis kembali pasca Pemilu berakhir.

Apabila dikorelasikan sikap independen Sang Kresna tersebut dengan kondisi dinamika Pemilu, menjadi tokoh yang ide dan kecerdikannya sama dengan Śakuni. Perbedaannya, Sang Kresna lebih condong memakai kecerdikannya untuk menolong pihak di sisi kebenaran, serta mengalirkan kecerdasannya guna menciptakan situasi yang harmonis. Kiat sikap politik Sang Kresna sebagai sepupu dari pihak yang berkонтestasi adalah tetap independen, namun tetap sedia jari juru penengah, penolong, dan adil dalam menegakkan kebenaran. Kiat dari sikap independen dan adil seperti itu bisa menjadi jawaban bagi pihak – pihak yang suka menebar konflik dengan cara mengadu domba (Amiruddin, 2020). Oleh karena itu, hasil telaah sikap politik Sang Kresna yang independen dan adil bisa dijadikan suri teladan yang baik oleh masyarakat Indonesia.

3. Bersikap Dingin Penuh Kedamaian

Pada setiap kontestasi politik perebutan kekuasaan seperti Pemilihan Umum (Pemilu), memang tidak bisa dipungkiri bahwa salah satu ancaman terbesar yang bisa saja hadir adalah timbulnya konflik yang berkepanjangan. Tidak jarang, konflik ini dimulai dari

kampanye hitam yang pada akhirnya mampu memutus tali persaudaraan (Doly, 2020). Lebih lanjut, konflik juga bisa berlanjut hingga pasca pemilihan. Hal ini terjadi ketika terdapat pihak yang diduga curang atau terlalu haus akan kekuasaan sehingga tidak mau mengalah.

Dalam wiracarita Mahābhārata puncak konflik disimbolisasi secara agung dalam perang besar bernama *Bhārata Yuddha*. Dimana kedua saudara yang dalam hal ini masih menjadi sepupu rela bertempur untuk memperebutkan kekuasaan negeri Bharata. Di satu sisi, pihak Pandava sesungguhnya berkenan untuk tidak berperang asal segala hak mereka dikembalikan oleh pihak Kaurava pasca pengasingan. Namun disisi lain, problematika hadir ketika Kaurava tidak berkenan menyerahkan hak – hak milik Pandava serta memilih untuk berperang (Titib, 2008). Untuk itulah pada *Udyogaparva*, dikisahkan bagaimana jiwa ksatria Sang Kresna yang rela turun tangan menjadi juru damai dan penengah sebagai upaya rekonsiliasi sebelum tercetusnya perang Bharata. Bahkan, Sang Kresna yang notabene juga menjadi raja agung saat itu, berkenan mendatangi kedua belah pihak untuk mendinginkan dinamika kontestasi politik yang tengah memanas. Hal tersebut dilakukan semata - mata guna membawa pesan perdamaian.

Sikap Sang Kresna yang berkenan jari juru damai dan penengah tersebut, sesungguhnya sangat dibutuhkan di masa dan pasca Pemilu. Sikap politik yang tetap dingin dan membawa pesan damai seperti Sang Kresna akan sangat berguna dalam mendinginkan suasana pasca Pemilu yang biasanya masih berlangsung panas. Dengan sikap yang berkenan menjadi juru damai, Pemilu akan hadir selaras dengan hakikatnya sebagai pesta demokrasi yang membawa kebahagiaan, tidak hanya sebagai kontestasi politik yang dibumbui oleh intrik kotor dan pertikaian. Oleh karena itu, telaah sikap damai dan penengah Sang Kresna ini

dapat menjadi pedoman bagi masyarakat Indonesia agar tidak mudah tersangkut dalam bumbu konflik, serta mampu menjadi masyarakat yang bijaksana untuk menyiasati kondisi pasca Pemilu dengan pikiran dingin untuk kebaikan bangsa.

4. Menjadi Pemilih Cerdas dengan Berdasar pada Kebenaran

Dari sisi esensi, hakikat kehadiran tokoh Sang Kresna di dalam wiracarita Mahābhārata adalah sebagai tokoh agung yang menegakkan kebenaran. Di dalam *Bhīṣmaparva* yang mengisahkan perang Bhārata dan kejatuhan Bhīṣma sebagai panglima perang pihak Kaurava, tersirat juga nasihat Sang Kresna kepada Arjuna tentang ajaran kehidupan yang akhirnya melahirkan kitab *Bhagavad Gita*. Di bagian *Bhīṣmaparva* ini, pada akhirnya Sang Kresna menunjukkan wujud Agung-Nya sebagai salah satu Avatara Tuhan yang turun ke dunia (Titib, 2008).

Dari sisi interpretasi cerita, telaah kehadiran tokoh Sang Kresna juga dikenal sebagai sosok lawan dari kelicikan Śakuni yang mewakili pihak ketidakbenaran (*Adharma*). Hal ini dibuktikan dari beberapa sisi cerita sering memperlihatkan kehadiran Sang Kresna sebagai sosok penolong pihak Pandava, untuk melawan kelicikan pihak Kaurava yang berada di bawah bayang – bayang Śakuni. Terlebih di saat perang *Bharata* mencuat sebagai puncak konflik dari kontestasi politik antara pihak Pandava dan Kaurava, kelicikan dan kecurangan Śakuni tidak terelakan (Aryani, 2022). Namun berkat kehadiran sosok Sang Kresna sebagai penasihat yang menunjukkan kecerdasan dengan berdasar pada kebenaran, rencana dan upaya curang dari Śakuni mampu terbantahkan (Titib, 2008).

Jika dikorelasikan dengan dinamika pasca kepemiluan, tantangan dan problematika akan hadirnya sosok seperti Śakuni tentu bisa mengancam

harmonisasi. Melalui ujaran kebencian, berita bohong, dan perbedaan pandangan dalam politik, oknum seperti Śakuni bisa menjadi ancaman besar untuk melahirkan konflik. Ancaman tersebut bahkan bisa menimbulkan polarisasi yang melahirkan ketegangan, pertikaian, sampai peperangan yang berkelanjutan (Yechezkiel & Takalamingan, 2023). Oleh karena itu, masyarakat Indonesia bisa menjadikan kiat sikap politik Sang Kresna sebagai pedoman untuk melawan ancaman oknum – oknum seperti Śakuni di dinamika Pemilu, dengan menjadi pemilih yang cerdas berdasar pada kebenaran.

III. SIMPULAN

Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan salah satu cermin terjadinya stabilitas politik dalam suatu bangsa. Sebagai salah satu negara demokrasi di dunia, Pemilu di Indonesia menjadi pesta demokrasi, sekaligus ajang kontestasi politik. Situasi ini bisa tercermin dari kasus penyebaran berita bohong, ujaran kebencian atau fitnah, politik uang, sampai kampanye hitam yang menjadi tantangan sekaligus problematika dinamika kepemiluan.

Dinamika kontestasi politik dalam memperebutkan kekuasaan sesungguhnya telah tercermin sejak dulu kala melalui wiracarita Mahābhārata. Dari kisah agung tersebut, muncul Sang Kresna sebagai salah satu tokoh yang mampu menunjukkan kiat sikap politik yang mampu menghadapi segala dinamika kontestasi politik. Kiat sikap politik Sang Kresna dalam wiracarita Mahābhārata secara temuan filosofis antara lain, menjadi tokoh yang menghukum Sisupala sebagai penyebar berita bohong sebagai cermin penguatan ajaran *Wacika Parisudha*, menjadi pihak yang independen dengan tetap memihak pada kebenaran selaras dengan ajaran *Upeska*, menjadi juru damai di tengah perseteruan pihak Pandava dan Kaurava sesuai pedoman ajaran *Dama*, serta

menjadi jawaban dari karakter licik Šakuni dalam berpolitik untuk menegakkan hal yang benar.

Melalui analisis secara interpretatif tentang sepak terjang Sang Kresna dalam wiracarita Mahābhārata, serta dikuatkan dengan korelasi ajaran universal Hindu yang direfleksikan, diperoleh hasil telaah suri teladan etis sikap politik Sang Kresna yang bisa dijadikan pedoman oleh masyarakat Indonesia dalam menghadapi dinamika pasca Pemilu, yaitu: mampu bersikap berani dan tegas pada kecurangan Pemilu, mampu bersikap independen dan adil di tengah kontestasi politik, bisa bersikap dingin penuh kedamaian di tengah panasnya dinamika Pemilu, serta menjadi pemilih cerdas dengan berdasar atas kebenaran. Hasil telaah sikap politik Sang Kresna ini, lebih lanjut bertujuan sebagai pedoman bagi masyarakat Indonesia untuk tetap cerdas, bijaksana, dan mengutamakan kepentingan bangsa.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrohman. (2021). Dampak Fenomena Politik Uang dalam Pemilu dan Pemilihan. *AWASIA: Jurnal Pemilu Dan Demokrasi*, 1(2), 142–159.
- Amiruddin, A. (2020). Pilkada Serentak dan Potensi Konflik di Sulawesi Selatan. *Jurnal Arajang*, 3(1), 30–42.
<https://doi.org/10.31605/arajang.v3i1.584>
- Arini, N. P. C., & Pramana, I. B. K. Y. (2021). Tri Kaya Parisudha sebagai Landasan Ajaran Etika dan Moral dalam Pendidikan Karakter bagi Generasi Muda. *Cetta Jurnal Ilmu Pendidikan*, 4(4), 747–761.
<https://doi.org/https://doi.org/10.37329/cetta.v4i4.3099>
- Aryani, N. K. (2022). Ajaran Susila Dalam Satua Leak Maslikuan. *Lampuhyang*, 13(1), 194–206.
<https://doi.org/10.47730/jurnallampuhyang.v13i1.299>
- Atmianti, N. P. E. P. (2024). Implementasi Ajaran Dasa Yama Bratha dalam Membentuk Sikap Religius pada Siswa di SMP Negeri 3 Denpasar. *Wahana Chitta Jurnal Pendidikan*, 5(1), 36–40.
https://doi.org/file:///Users/mac/Downloads/admin,+Section+editor,+6_Artikel_Ni+Putu+Eti+Praya+Atmianti.pdf
- Damayanti, V. V. W. (2018). Relasi Mahābhārata dengan Praktik Poligami yang Berkembang pada Masyarakat Jawa. *Jurnal Pena Indonesia*, 4(1), 24–39.
<https://doi.org/https://doi.org/10.26740/jpi.v4n1.p24%20-%2039>
- Delmana, L. P., Zetra, A., & Koeswara, H. (2020). Problematika dan Strategi Penanganan Politik Uang Pemilu Serentak 2019 di Indonesia. *Electoral Governance Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia*, 1(2), 1–20.
<https://doi.org/10.46874/tkp.v1i2.61>
- Doly, D. (2020). Penegakan Hukum Kampanye Hitam (Black Campaign) di Media Sosial: Pembelajaran Pemilihan Umum Presiden Tahun 2019. *Kajian*, 25(1), 1–18.
<https://doi.org/https://doi.org/10.22212/kajian.v25i1.1885>
- Nadra, I. N. (2022). Kepemimpinan Hindu dalam Membangun Manusia Seutuhnya. *Kamaya: Jurnal Ilmu Agama*, 5(3), 155–166.
<https://doi.org/10.37329/kamaya.v5i3.1995>
- Permana, I. D. G. D. (2023). Analisis Karakter Šakuni dalam Kisah Mahābhārata pada Situasi Menjelang Kontestasi Politik 2024. *Kalangwan: Jurnal Pendidikan Agama, Bahasa Dan Sastra*, 13(2), 162–169.
<https://doi.org/10.25078/kalangwan.v13i2.2896>
- Pratiwi, N. K. S. (2022). Metode Pembelajaran Dasa Dharma Sebagai Implementasi Pendidikan Holistik. *Metta: Jurnal Ilmu Multidisiplin*, 2(3), 133–145.

- <https://doi.org/https://doi.org/10.37329/metta.v2i3.1799>
- Putri, M. K. (2023). Problematika Pemutakhiran Daftar Pemilih dalam Pemilu. *Jurnal Bawaslu DKI Jakarta*, 8(2).
- Rambe, I. S. (2022). Penguatan Pengawasan Pemutakhiran Daftar Pemilih pada Pemilu Serentak Tahun 2024. *Jurnal Bawaslu DKI Jakarta Edisi Desember 2022*.
- Rudiarta, I. W. (2025). Integrasi Prinsip Catur Paramita dalam Pembelajaran Berdiferensiasi pada Pendidikan Agama Hindu: Studi Kasus di SMAN 4 Mataram. *Jurnal Penelitian Agama Hindu*, 9(4), 38–56.
<https://doi.org/https://doi.org/10.37329/jpah.v9i4.4312>
- Subiyanto, A. E. (2020). General Elections with Integrity as an Update of Indonesian Democracy. *Jurnal Konstitusi*, 17(2), 355–371.
<https://doi.org/10.31078/jk1726>
- Sudirga, I. B., & Segara, I. N. Y. (2017). *Pendidikan Agama Hindu dan Budi Pekerti SMA/SMK Kelas X (Cetakan ke-3)*. Pusat Kurikulum dan Perbukuan, Balitbang, Kemendikbud.
- Sugiyono. (2023). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. CV. Alfabeta.
- Syarofuzzaman, A., & Al-hamid, R. (2024). Dinamika Stabilitas Politik di Indonesia Ditinjau dari Pemikiran Politik Kekuasaan Nicholas Machiavelli. *Politeia: Jurnal Ilmu Politik*, 16(1), 22–29.
<https://doi.org/10.32734/politeia.v16i1.11833>
- Tim Pengkaji dan Penerjemah, P. S. V. (2021a). Bhagavadgita dan Terjemahannya. In *Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu Kementerian Agama RI*. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu Kementerian Agama Republik Indonesia.
<https://wedangga.kemenag.go.id/>
- Tim Pengkaji dan Penerjemah, P. S. V. (2021b). Sārasamuccaya dan Terjemahannya. In *Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu Kementerian Agama RI*. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu Kementerian Agama RI.
- Titib, I. M. (2008). *Itihāsa Ramāyāna & Mahābhārata (Viracarita) Kajian Kritis Sumber Ajaran Hindu (Paramita (ed.))*.
- Yehezkiel, P. W., & Takalamingan, M. (2023). Peran Partai Politik Mengatasi Politik Identitas dalam Pemilu. *Electoral Governance: Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia*, 4(2), 251–273.
<https://doi.org/10.46874/tkp.v4i2.736>